
KONTESTASI GELAR ADAT "SUTTAN" DALAM PANGGUNG POLITIK LAMPUNG

Annissa Valentina

Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Lampung

Email: nisavalen26@gmail.com

Abstract

This article examines the shifting of the meaning of the title of adat where there is a dualism of the function of the title of adat when traditional leaders enter the political world or vice versa, politicians who get customary titles. The highest customary titles such as "Suttan" were only used in Lampung Ethnic traditional ceremonies as indigenous or local because of the sacredness of their meaning, not for all people living in Lampung, but now customary titles are also used by politicians in political contests by attracting attention local people through the procession get titles in traditional ceremonies. The character of Lampung politicians tends to be ethnicistic because many ethnic groups feel excluded by transmigrant communities so they tend to be attracted to politicians who bring local regional issues in campaigning. There is a dualism of meaning caused by the use of customary titles in the campaign of politicians in Lampung Province, manifest titles of custom and controlling people's interest as political masses towards the elite campaign of the indigenous head of the region.

Keywords: *Local Politician, Lampung Ethnic, Traditional Title, Politic Campaign.*

A. PENDAHULUAN

Saat ini kehidupan masyarakat tak lepas dari politik, terutama ketika pemilihan umum atau kepala daerah mulai digaungkan. Para politisi akan sibuk mencuri hati rakyat dan hadir di berbagai agenda kegiatan di mana banyak orang akan hadir. Politik pun mulai hadir dalam keseharian hingga masuk menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri, dari yang tidak mengerti politik hingga para politisi yang sudah belajar mengenai politik itu sendiri. Pada masa demokrasi seperti ini semua orang memang dibebaskan untuk masuk atau untuk memilih tidak berpartisipasi dalam politik.

Para politisi merupakan mereka yang memilih masuk ke dalam dunia politik hingga melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan mencari massa yang kelak akan memilihnya untuk masuk ke jajaran

pemerintahan atau birokrasi baik tingkat daerah maupun pusat. Semua orang berhak untuk menjadi politisi dengan bergabung di partai tertentu dan berkampanye seperti halnya yang dilakukan oleh para politisi ketika sudah masanya dalam pemilihan umum ataupun kepala daerah tertentu. Seperti halnya yang terjadi di Provinsi Lampung, sebuah wilayah yang berada di ujung selatan pulau Sumatera.

Lampung merupakan salah satu provinsi yang pernah menjadi tujuan transmigrasi dari pulau Jawa, tak mengherankan jika penduduknya didominasi oleh Etnis Jawa. Perkembangan persebaran etnik Jawa di Lampung dimulai sejak kolonisasi di tahun 1905 oleh Belanda. Kondisi ini mengakibatkan adanya pembauran etnik lintas generasi di Lampung. Pelly (1989:2) menjelaskan bahwa kelompok dominan dalam masyarakat majemuk mencoba berfungsi sebagai “wadah pembauran” (*melting pot*) kelompok-kelompok etnis lainnya. Sebagai kelompok-kelompok minoritas (*sub-ordinat group*), mereka menggunakan budaya kelompok etnis yang dominan (*super-ordinat-group*) sebagai orientasi akulturasi dalam kehidupan bersama. Dalam pergaulan sehari-hari tampak bahwa kelompok-kelompok minoritas berusaha menggunakan bahasa, etiket, pakaian, sistem budaya, tipikal makanan kelompok dominan. Seiring berjalannya waktu, etnis pendatang tidak hanya dari Pulau Jawa, lokasi yang strategis membuat Lampung menjadi tempat bertemunya berbagai etnis dari berbagai daerah di Indonesia hingga kini menjadi semakin banyak dan mendominasi dalam jumlah penduduk Provinsi Lampung itu sendiri.

Dominasi secara jumlah tersebut mempengaruhi masyarakat lokal atau masyarakat pribumi dalam berbagai hal, mata pencaharian, makanan, termasuk secara bahasa. Selain itu, budaya lokal atau budaya dari etnis Lampung itu sendiri juga hanya dilakukan saat-saat tertentu misalnya saat acara pernikahan dilakukan atau acara sejenis lainnya yang menggunakan identitas adat. Dalam hal ini, masyarakat lokal merasa bahwa identitas mereka semakin terpinggirkan, hingga kemunculan para tokoh adat menjadi tokoh politik atau tokoh pemerintahan menjadi salah satu faktor yang membangkitkan rasa

bangga dalam dirinya bahwa tokoh adat tidak hanya dikenal dalam adat itu sendiri. Selain itu, muncul tren juga di mana para politisi pusat yang mengkategorikan Lampung sebagai basis mencari massa atau pendukung. Cara yang digunakan adalah ikut dalam kegiatan adat hingga mendapat gelar adat di mana ini menjadi efektif bagi mereka mencari perhatian masyarakat setempat, terutama masyarakat lokal.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini didasari oleh riset kepustakaan dengan menelusuri varian sumber-sumber sekunder yang terdapat dalam sejumlah kajian yang terekan dalam teks tertulis berupa buku, makalah, artikel jurnal dan laporan-laporan yang relevan. Prosedur yang lazim digunakan yakni:

1. Melakukan inventarisir dan identifikasi kepustakaan yang berkaitan dengan fungsi dan pemakaian gelar Suttan atau sejenisnya,
2. Mengenal pola beragam hal yang terjadi ketika gelar menjadi nilai politis, selanjutnya menganalisis dan menyajikan secara deskriptif beragam hal tersebut lalu dikaitkan dengan konteks adat Lampung, dan
3. Mengajukan kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Makna Gelar "Suttan" dalam Adat Lampung

Gelar adat memiliki fungsi tersendiri bagi masyarakat Lampung. Tidak setiap orang memiliki gelar yang sama atau sejenis karena bergantung pada upacara adat apa yang pernah ia adakan sebelumnya. Berdasarkan sejarahnya, masyarakat adat Lampung memiliki pandangan hidup yang disebut dengan "*Piil Pesenggiri*" yang selalu menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. *Piil* berasal dari bahasa Arab "*fiil*" yang berarti perilaku dan "*pesenggiri*" yang maksudnya adalah keharusan untuk bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, serta kewajiban, namun dalam realita saat ini filsafat ini mengalami deformasi. *Piil* diartikan sebagai perasaan ingin besar dan dihargai. Sikap watak *Piil*

Pesenggiri ini nampak sekali pada lingkungan masyarakat Lampung yang beradat Pepadun.

Didasari oleh pandangan *Piil Pesenggiri* yang salah satu unsurnya adalah *bejuluk beadek*, ini menghendaki agar seseorang selain mempunyai nama juga diberi gelar panggilan terhadapnya. Seorang pengamat Belanda pada masa lalu mengatakan bahwa orang Lampung gemar dengan kemegahan (*ijdelheid*) (Septiana, 2014). Masa kini hal itu masih tergambar dalam upacara-upacara adat yang disebut dengan upacara Begawi Cakak Pepadun yang berarti membuat suatu pekerjaan sedangkan Begawi Cakak Pepadun adalah berpesta adat besar naik tahta kepenyimbangan dengan mendapat gelar nama yang tinggi (Hadikusuma, 2003).

Orang Lampung terutama yang beradat Pepadun sejak kecil baik pria maupun wanita bukan saja diberi nama resmi sesuai akta lahir tetapi juga diberi "*Juluk*" yaitu nama panggilan atau gelar kecil yang diberikan oleh kakek atau neneknya, kemudian setelah menikah maka orang Lampung akan diberi adok atau adek yaitu gelar bagi orang yang telah berkeluarga. Adok atau adek merupakan gelar adat Lampung yang diberikan kepada seseorang tergantung kedudukan dan fungsinya. Ada perbedaan antara proses pemberian gelar menurut masyarakat Pepadun dan masyarakat Saibatin/pesisir. Pada masyarakat Pepadun sebuah adek atau gelar lebih cenderung pada prinsip demokrasi, di mana setiap individu dalam sebuah pranata adat bisa mengukuhkan kedudukannya didalam adat dengan syarat syarat tertentu dalam sebuah upacara *Begawi Cakak Pepadun*, jika menginginkan gelar adat, masyarakat adat pepadun dapat membeli gelar, dalam proses ini siapapun dapat melaksanakannya.

Berbeda dengan adok pada masyarakat pesisir, adok tidak diberikan serta merta melainkan harus mempunyai (telah berdiri) kesatuan masyarakat adat yang diberi nama kesebatinan. Pemberian adok pada masyarakat adat Lampung Saibatin disebut dengan istilah *Saibatin Lulus Kawai* yang bermakna

bahwa kedudukan seseorang didalam adat diwariskan dari garis lurus keturunan tertua dalam masyarakat setempat (Gusman, 2010).

Di dalam budaya masyarakat adat Pepadun juga dikenal kepala-kepala adat yang disebut Penyimbang dengan gelar Suttan, tetapi Suttan ini dapat juga memberikan gelar Suttan kepada siapa saja dalam masyarakat adat asalkan dapat memenuhi syarat-syarat atau lebih cenderung pada prinsip demokrasi, terutama pada saat penyelenggaraan pesta adat *Cakak Pepadun* (naik pepadun) yang dilakukan dengan biaya yang besar dan mahal, karenanya di dalam satu masyarakat Pepadun, sering kita mendengar bahkan saksikan berpuluh-puluh bahkan mungkin beratus orang yang bergelar Suttan, akan tetapi hal tersebut tidak identik dengan Penyimbang atau Kepala Adat, karena gelar Suttan bukanlah status sebagai kepala adat atau Penyimbang.

Mendapatkan gelar hal tersebut adalah dalam rangka membesarkan lingkungan masyarakat adatnya yang secara demokratis memberi kesempatan kepada setiap orang dalam masyarakat untuk bisa mendapatkan gelar tertinggi itu. seringkali, pelaksanaan pemberian gelar Suttan terjadi setelah dilakukannya pernikahan yang sah antara pria dan wanita baik sah menurut negara maupun agama. Setelah melakukan pernikahan pelaksanaan pemberian gelar Suttan dilaksanakan dimulai dari acara *Pemandai Aneg* sampai dengan acara *Pangan Kibau Mupadun* (Manggara, 2016).

2. Dualisme Fungsi Gelar Adat Kini Kaitannya Dengan Strategi Politik

Secara istilah Bahasa Indonesia, politik merupakan kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan asas, prinsip, keadaan, jalan cara dan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan strateginya merupakan cara mendapat kemenangan atau pencapaian tujuan, sehingga stragei menjadi cara melaksnakan politik untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik itu sendiri. Keduanya tak bisa dipisahkan karena memang dalam mencapai tujuan perlu strategi.

Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa politik adalah "bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu yang di dalamnya terdapat proses pengambilan keputusan". Dalam melaksanakan tujuan-tujuan tersebut perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai baik, untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini.

Rush dan Althoff menjelaskan mengenai esensi dari politik. Menurutnya batasan mengenai politik bermacam-macam. Politik bisa diartikan sebagai proses penyelesaian dari konflik-konflik manusia: atau proses di mana masyarakat membuat keputusan-keputusan ataupun mengembangkan kebijakan-kebijakan tertentu: atau secara otoritatif mengalokasikan sumber-sumber dan nilai-nilai tertentu', atau berupa pelaksanaan kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat. Namun demikian, meskipun politik itu memiliki batasan yang bermacam-macam, akan sangat membantu apabila menganggap kekuasaan sebagai titik sentral dari studi politik. Batasan ini juga disepakati oleh Duverger (1989) dan beberapa pakar lainnya. Dengan demikian tampaknya kita menyepakati bahwa politik dibatasi sebagai "masalah kekuasaan", dan tentunya kita pun sepakat pula membatasi ilmu politik sebagai "ilmu tentang kekuasaan" (Suharno, 2016).

Terdapat beberapa hal yang bisa menjadi sumber kekuasaan itu sendiri, seperti fisik sumber (*physical force*), sebuah energi yang bisa digunakan untuk menguatkan kemampuan, akses eksklusif pada barang dan jasa, mengontrol ikatan kasih sayang, serta memiliki pengetahuan. Dalam kekuasaan, hubungan yang terjalin bukanlah bersifat sukarela karena hal ini dikembangkan berdasarkan kalkulasi politik yang terkait dengan untung dan rugi.

Dalam tulisan ini, yang ditekankan adalah dualisme penggunaan gelar adat sebagai bagian dari menjalin kekuasaan yang melalui perhitungan politis. Kini, gelar adat tak hanya digunakan atau diberikan pada orang tertentu dalam Etnis Lampung, namun menjadi Gelar kehormatan yang diberikan pada tokoh nasional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mendapatkan gelar adat, seseorang harus melalui upacara adat “Bejuluk Beadek” hingga Begawi yang tentunya mengeluarkan biaya yang tak sedikit dalam arti tidak semua orang memiliki biaya yang cukup untuk mengadakannya, terutama harus menyembelih sapi dan sebagainya. Namun, bagi yang mampu memilikinya, gelar merupakan kebanggaan dan identitas seseorang, termasuk menentukan kelas, seperti Pengiran, Rajo, Suttan yang merupakan kelas tertinggi. Gelar juga merupakan usaha untuk melestarikan adat Lampung dengan melalui upacara-upacara khas yang dapat disaksikan oleh umum hingga turun temurun diharapkan tak lekang oleh waktu. Pada kenyataannya, gelar tidak hanya dimiliki oleh etnis Lampung itu sendiri, tapi juga orang-orang yang menjadi tokoh politik atau pejabat nasional seperti di bawah ini:

- a. Pada 15 Desember 2013: Irjen (Pol) Dedi Mawardi diangkat dengan gelar adat “Rajo Kuaso” sebagai saudara Sekretaris Provinsi Lampung dalam Gelar Budaya Gawi Adat Muaghi
(DetikLampung edisi 15 Desember 2013)
- b. Pada 23 Oktober 2014: Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menganugerahkan gelar pada enam tokoh masyarakat
(Antara Lampung edisi Kamis, 23 Oktober 2014)
- c. Pada 11 April 2016: Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem dianugerahi gelar adat Suttan Turunan Aji oleh Bupati Lampung Tengah
(Budyuhanda 12 April 2016)
- d. Pada 5 April 2017: Tokoh Adat Melinting Lampung Timur bergelar “Pangeran Banjar Negara” mendukung salah stau tokoh nasional dalam pencalonannya menjadi kepala daerah 2018

(Harian Fokus edisi 5 April 2017)

- e. Pada 21 Mei 2017: Menteri Pertahanan Indonesia Jendral (Purn) Ryamizars Ryacudu mendapat gelar “Sutan Tuan Kaca” dari Perwakilan 62 marga oleh Sutan Raja Putting Burung Kumbang Kristop

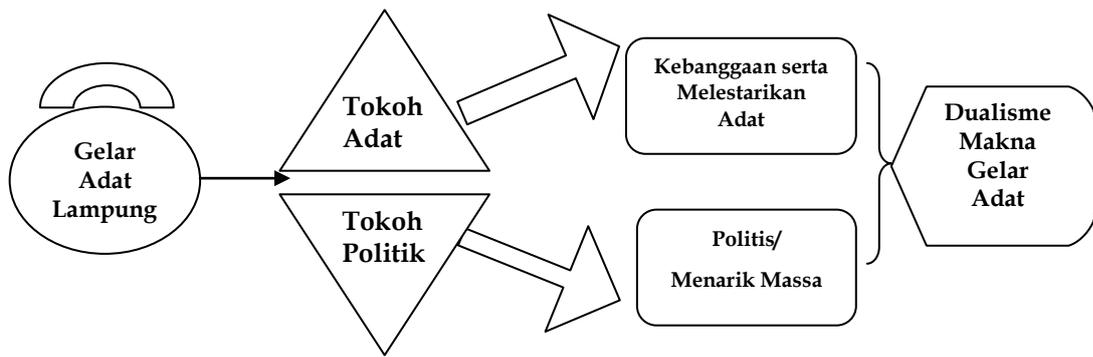
(Saibumi.com edisi Minggu, 21 Mei 2017)

- f. Pada 11 April 2016: 311 tokoh masyarakat Lampung Tengah dianugerahi gelar adat oleh Bupati Lampung Tengah dalam rangkaian Gawi Agung Bejuluk Beadek

(Nyowkabar edisi 19 Juli 2017)

Secara umum, banyak orang hanya akan menganggapnya sebagai fenomena yang wajar karena mereka merupakan tokoh-tokoh terhormat bagi negeri ini. Hal ini merupakan kehormatan bagi masyarakat Lampung ketika tokoh-tokoh tersebut menyandang gelar adat sehingga dapat memasyarakatkan gelar adat ke kancah nasional. Hubungan adat yang terjalin tersebut bertujuan untuk mengikatkan diri pada tokoh tertentu karena yang dibawa adalah gelar-gelar tertentu disertai jabatan struktural tertentu secara politis maupun birokrasi.

Melihat beberapa penganugerahan di atas, dalam menyatakan dirinya pada masyarakat Lampung, para tokoh tersebut membawa gelar adat yang sudah didapatnya. Bagi dirinya sendiri, para tokoh tersebut merasa sudah dianggap sebagai bagian dari masyarakat etnis Lampung di mana apapun yang nanti dikatakannya akan diiyakan oleh masyarakat yang secara tidak langsung menjadi kekuatannya, juga bekalnya ketika mencalonkan diri pada jabatan struktural tertentu. Seperti yang dikatakan Coleman dalam *Rational Choice Theories in Political Sociology*, selalu ada hitungan resiko ketika menjalin hubungan politik serta memperoleh dukungan melalui usaha mengendalikan hati masyarakat. Ini yang dikatakan politis.



Gambar 1
Dualisme Fungsi Gelar Adat Lampung

D. KESIMPULAN

Politik menjadi sebuah ajang kontestasi bagi para tokoh untuk saling menarik perhatian rakyat atau massa politik. Salah satunya adalah mendekati masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat etnis Lampung yang masih lekat dengan gelar adat. Gelar adat yang pada awalnya bermakna kebanggaan bagi yang memiliki gelar yang melekat padanya, kini memiliki makna lain setelah para politisi menjadikannya anugerah bagi dirinya serta tokoh politik atau birokrat lainnya, yaitu menjalin hubungan politis. Dualisme makna tersebut membuat gelar adat tak lagi gelar yang sakral di mana setiap orang harus berusaha keras untuk mendapatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gusman, Romi. 2010. *Peranan Suntan Marga Ngambur Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat (Studi di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Fajar Agung.
- Kise, Bauldry. 2005. *Rational Choice Theories in Political Sociology*. New York: HarperCollins.

- Manggara, Muhammad Fajri. 2016. *Proses Pemberian Gelar Suttan pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Abung Marga Beliuk (Studi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Septiana, Ria. 2014. *Faktor-faktor Penyebab Menurunnya Pelaksanaan Budaya Begawi Cakak Pepadun Pada Masyarakat Etnis Lampung Abung Pepadun di Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
- Suharno. 2016. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. Fakultas Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Antara Lampung edisi Kamis, 23 Oktober 2014 diakses melalui lampung.antaranews.com/berita/277100/pemkab-lampung-selatan-beri-gelar-tokoh-masyarakat-pada-8-November-2017
- Budiyuhanda 12 April 2016 diakses melalui www.budiyuhanda.com/news/gelar-adat-lampung-suttan-nata-negara-untuk-surya-paloh-yang-berarti-pemimpin-masyarakat-lampung-pada-8-November-2017
- DetikLampung edisi 15 Desember 2013 diakses melalui www.detiklampung.com/berita-848-gelar-berlian-angkat-saudara-dedi-mawardi.html pada 8 November 2017
- Harian Fokus edisi 5 April 2017 diakses melalui www.harianfokus.com/2017/04/05/tokoh-adat-melinting-lampung-timur-dukung-alzier-maju-pilgub/ pada 8 November 2017
- Nyowkabar edisi 19 Juli 2017 diakses melalui www.nyowkabar.com/berita-5275-gawi-agung-bejulu-beadek-311-tokoh-masyarakat-lampung-tengah-terima-gelar-adat/.html
- Saibumi.com edisi Minggu, 21 Mei 2017 diakses melalui www.saibumi.com/artikel-83573-ryamizard-ryacudu-resmi-sandang-gelar-sutan-tuan-kaca-marga-istri-bergelar--sutan-ayu-mahkota-marga-d.html pada 8 November 2017